



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

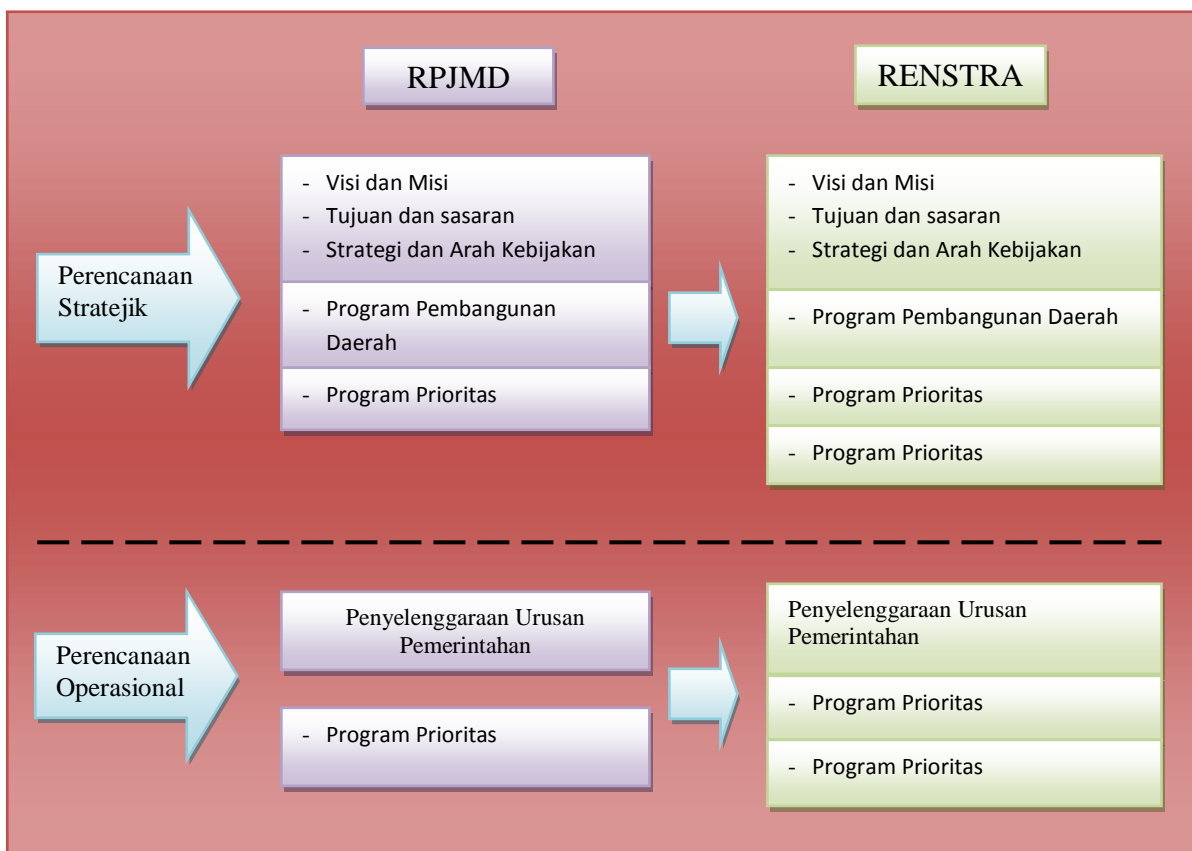
Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut ;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Bojongloa Kidul selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program



pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- i. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- j. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- l. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;



- t. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
- u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- v. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- w. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- x. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
- y. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.
- z. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
- aa. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan



kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Bojongloa Kidul merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.



Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kidul bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kidul mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses



penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

**BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN BOJONGLOA
KIDUL KOTA BANDUNG**

Gambaran Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

**BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG**

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN KECAMATAN BOJONGLOA
KIDUL KOTA BANDUNG**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan

**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, INDIKASI
KEGIATAN DAN DANA INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,



Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

**BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BOJONGLOA
KIDUL KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG

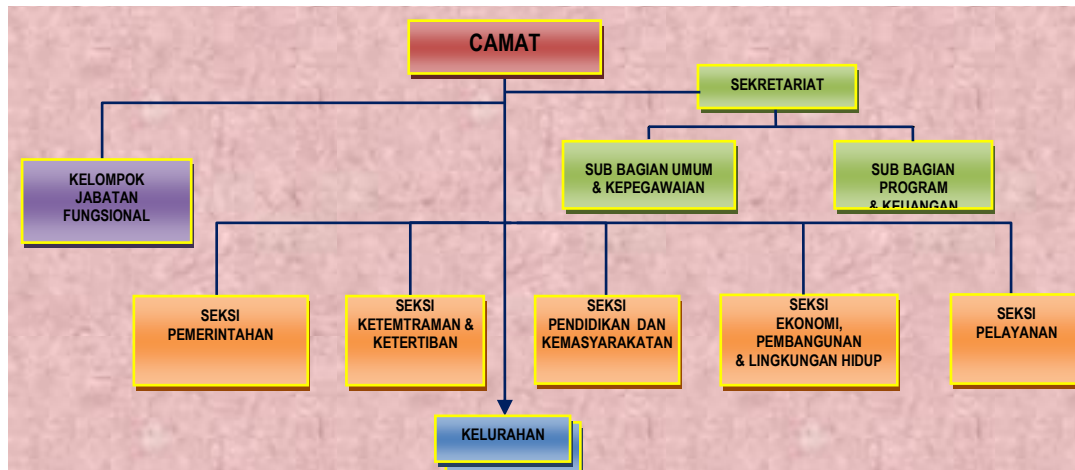
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007, susunan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan.
- f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bojongloa Kidul
Kota Bandung



Sumber : *Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah*

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Bojongloa Kidul mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Camat mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

2. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
 - c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4. Sub bagian Keuangan dan Program

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan;



- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
- d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

5. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
 - b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c. pelayanan administrasi pertanahan;
 - d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan



6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.

7. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

- (1) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan;
 - b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;



- c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;
- d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
- f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
- g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan.

8. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- (1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;



- e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
- f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
- g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

8. Seksi Pelayanan

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
 - b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;
 - c. pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. pelayanan administrasi umum lainnya;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 65 orang. Dari jumlah pegawai tersebut,



disamping Camat sebanyak 21 orang (32%) merupakan pegawai di Kecamatan dan 44 orang (68%) tersebar di 6 Kelurahan.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 pegawai, eselon IVA sebanyak 11 pegawai yaitu para kasi kecamatan dan para lurah, eselon IVB sebanyak 32 orang yaitu kasubag kecamatan, para seklur dan kasi kelurahan dan sisanya 22 orang pelaksana di Kecamatan dan di kelurahan-kelurahan.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul, sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PERSONIL	ESELON				PELAKSANA	JML
			IVB	IVA	IIIB	IIIA		
1	KECAMATAN	21	2	5	1	1	11	21
2	KEL. SITUSAEUR	8	5	1			3	9
3	KEL. KEBONLEGA	8	5	1			1	7
4	KEL. CIBADUYUT	9	5	1			3	9
5	KEL. CIB. KIDUL	7	5	1			1	7
6	KEL. CIB. WETAN	8	5	1			2	8
7	KEL. MEKARWANGI	4	3				1	4
	J U M L A H	68	32	11	1	1	22	65

Sumber : Bagian TU Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2013

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan dan Pendidikan yang Ditamatkan

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	JML	SD	SLP	SLA	DPL	S1	S2	JML
1	KECAMATAN	1	10	8	2	21	0	1	11	0	7	1	20
2	KEL. SITUSAEUR	0	3	4	1	8	0	1	5	0	2	1	9
3	KEL. KEBONLEGA	0	1	7	0	8	0	0	7	0	1	0	8
4	KEL. CIBADUYUT	1	2	6	0	9	0	1	6	0	2	0	9
5	KEL. CIB. KIDUL	0	1	6	0	7	0	0	2	0	5	0	7
6	KEL. CIB. WETAN	0	2	6	0	8	0	0	4	1	3	0	8
7	KEL. MEKARWANGI	0	1	3	0	4	0	0	4	0		0	4
	J U M L A H	2	20	40	3	65	0	3	39	1	20	2	65

Sumber : Bagian TU Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2013

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sebanyak 2 orang (3%) memiliki pendidikan S2, sebanyak 20 orang (30%), yang memiliki pendidikan S1, sebanyak 1 orang (1,5%), yang memiliki pendidikan D3, sebanyak 39 orang (60%), yang memiliki pendidikan SLTA dan sebanyak 3 orang (4.5%), yang memiliki pendidikan SLTP.

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.



2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bojongloa Kidul berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.3
Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
Tahun 2009-2013

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 2009	2 2010	3 2011 (Akumulasi)	4 2012	5 2013	1 2009	2 2010	3 2011 (Akumulasi)	4 2012	5 2013	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	a.	% RT dan RW yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya			60	70	80	90	100	65	72	85	90	95	108	102	106	100	95
		% Kelurahan yang telah memenuhi standar administrasi pemerintahan			75	80	85	90	100	75	75	78	80	85	100	97	92	89	85
		% layanan administrasi pertanahan yang selesai tepat pada waktunya			85	87	90	95	100	85	87	90	95	100	100	100	100	100	100
2	a.	% KTP , KK yang selesai tepat pada waktunya			100	100	100	100	100	76	78	84	85	86					0
		% Layanan administrasi lainnya yang selesai tepat pada waktunya.			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Linmas yang telah mengikuti pendidikan dalam kelinmasan			100	130	160	190	220	100	120	150	170	200	0	-10	-10	-20	-30
		% penurunan pelanggaran terhadap Perda			50	60	65	70	75	50	60	60	65	70	100	100	92	85	93
		% wilayah bebas sampah			60	70	80	90	100	60	62	65	70	75	100	88	80	81	75



	Jumlah masyarakat yang dibina dalam pencegahan dan penanggulangan bencana				140	180	220	260	300	140	180	220	260	300	100	100	100	100	100
	% masalah sosial masyarakat yang difasilitasi pemecahannya				65	70	75	80	85	60	67	70	75	78	92	96	93	94	92
	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100
	% kegiatan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan keluarga serta generasi muda yang di fasilitasi				60	65	70	75	80	60	61	67	72	73	100	94	86	96	91
	Jumlah UKM dan koperasi yang dibina;				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
	Jumlah buku data potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	% pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial yang difasilitasi;				50	55	60	65	70	50	55	60	65	70	100	100	100	100	100
	Jumlah organisasi masyarakat yang aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;				2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	100	100	100	100	100
	Jumlah penambahan pohon pelindung di jalan protokol				500	1000	1500	2000	2500	500	1000	1500	2000	2500	100	100	100	100	100

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
Tahun 2013

Uraian	Anggaran
Belanja	10.634.099.838,88
- Belanja Tidak Langsung	5.248.134.321,88
- Belanja Langsung	5.385.965.517,00
Bertambah/ (Berkurang)	

Sumber : Bagian TU Setda Kota Bandung (angka unaudited 2013)

Realisasi keuangan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung pada tahun anggaran 2013 untuk belanja sebesar Rp.10.380.465.069 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.002.804.022 (48,2%) dan belanja langsung sebesar Rp.5.377.661.047 (51,8%).

Untuk periode pelayanan Tahun 2009-2013 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.5
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
Tahun 2009-2013

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja	37.640.376.455	35.823.059.703
- Belanja Tidak Langsung	20.720.607.564	19.992.641.822
- Belanja Langsung	16.919.768.891	15.830.417.881
Bertambah/ (Berkurang)		

Sumber : SIMDA Pemerintah Kota Bandung (angka unaudited 2012)

Realisasi keuangan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung selama periode tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013 untuk belanja sebesar Rp. 35.823.059.703 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.992.641.822 (55,8 %) dan belanja langsung sebesar Rp. 15.830.417.881 (44,2 %).

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung selama tahun 2009-2013 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
Tahun 2009-2013

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	$\frac{17}{(6-2)/5}$	$\frac{18}{(11-7)/5}$
BELANJA	5.456.530.571	6.184.659.352	6.779.468.641	8.585.618.053	10.634.099.838	5.393.999.753	5.422.448.076	6.779.468.641	8.379.685.380	10.380.465.069	1,15%	12,32%	7,86%	2,40%	2,39%	1.035.513.853	997.293.063
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.100.542.135	3.549.012.502	4.143.821.791	4.679.096.815	5.248.134.321	3.064.883.923	3.493.918.650	4.143.821.791	4.576.274.175	5.002.804.022	1,15%	1,55%	6,98%	2,20%	4,67%	429.518.437	387.584.020
BELANJA LANGSUNG	2.355.988.436	2.635.646.850	2.635.646.850	3.906.521.238	5.385.965.517	2.329.115.830	1.928.529.426	2.635.646.850	3.803.411.205	5.377.661.047	1,14%	26,83%	9,26%	2,64%	0,15%	605.995.416	609.709.043

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 sebesar 2,3
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 65,7

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 85 %
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 86 %
3. Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan 70 %

4. Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebesar 73%.
5. Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarakat sebesar 3 % (data tahun 2009 = Rp. 4.051.383.447, tahun 2013 = Rp. 4.766.333.468)
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD
7. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008
8. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
9. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
10. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah
11. Pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola) masih rendah

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Bojongloa Kidul, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tidak adanya juklak dan juknis pelimpahan kewenangan
3. Tidak adanya bintek dari SKPD asal kewenangan terhadap kecamatan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika

global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan

pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and*

punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Bandung** : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang;
- Unggul** : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung;
- Nyaman** : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat

memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya;

Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi

sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi	Misi
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
	Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
	Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

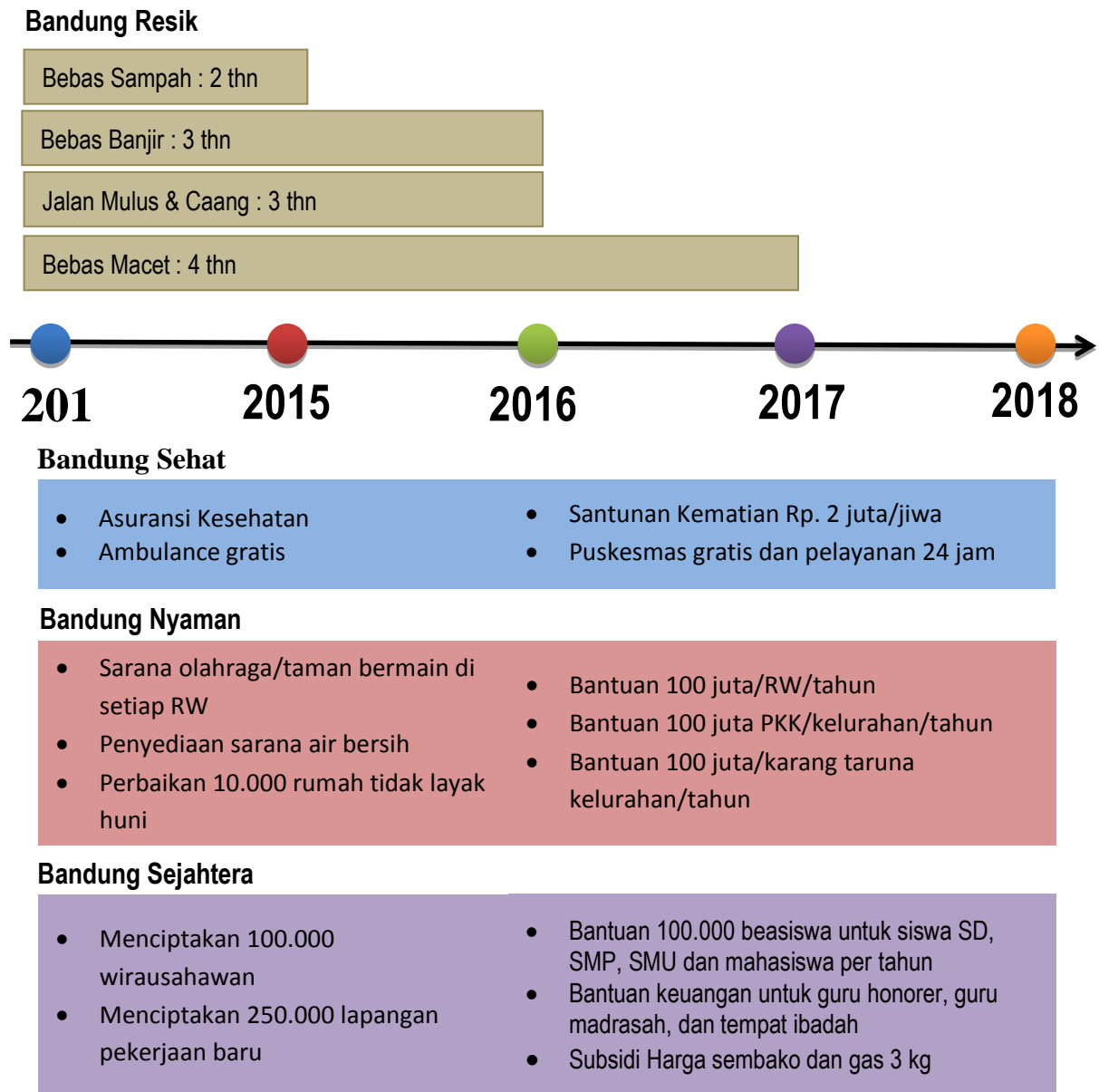
No.	Aspek	Indikator
1	<i>BANDUNG SEHAT</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Kesehatan 2. <i>Ambulance</i> gratis 3. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
2	<i>BANDUNG RESIK</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3	<i>BANDUNG NYAMAN</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun



No.	Aspek	Indikator
		<ol style="list-style-type: none">5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
4	BANDUNG SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan 100.000 wirausahawan2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg6. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Gambar 3.3
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih



Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul bersama *stakeholder* untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung

dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul dan Kota Bandung pada umumnya.

Demikian pula adanya instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di dibandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rencana Aksi Menuju Bandung Juara

No.	KELOMPOK KERJA	JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI
1	KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG	24
2	KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA	11
3	KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG	18
4	KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU	30
5	KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL)	11
6	KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG	7
7	KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG	16
8	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA	15
9	KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY	13
10	KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG	22
11	KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA	21
12	KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG	15
13	KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN	14
14	KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG	14
15	KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG	6
16	KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK	21
17	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM	12

No.	KELOMPOK KERJA	JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI
18	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN	15
19	KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG	7
20	KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG	5
21	KELOMPOK KERJA REFORMASI	8
22	DEKRANASDA BANDUNG	9
23	KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG	6
24	KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP	15
	Jumlah	335

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;

- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:

- a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur
- b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;
- c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

- d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
- e. menyeraskan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

- a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
- b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
- c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
- d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
- e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
- f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan;
- g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;

- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan Tematik

Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung pada tahun 2013 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.5
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
dan Dinamika Lingkungan Strategis

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1. 2. 3. 4. 5.	<p>Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>Mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;</p> <p>Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;</p> <p>Membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya</p>	<p>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p> <p>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bojongloa</p>



No.	Tupoksi	Isu Strategis
		<p>Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p> <p>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p> <p>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,</p>



No.	Tupoksi	Isu Strategis
		<p>pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;c. Pengamanan barang daerah;d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG

4.1 VISI

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih

terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung akan berperan melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :

**”MEWUJUDKAN KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL YANG
TERBAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG
TAHUN 2018”**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Kecamatan Bojongloa Kidul

Kecamatan Bojoloa Kidul adalah salah satu Kecamatan yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2. Terbaik

Terbaik (*the best*) artinya kondisi yang lebih dari baik, karena baik (*good*) itu tidak cukup baik, maka visi ini mendorong aparatur untuk bertindak, berperilaku, melayani masyarakat dan hal-hal yang mengatas-namakan Kecamatan Bojongloa Kidul selalu “TERBAIK”, terbaik di Kota Bandung untuk mendukung perwujudan Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara” atau terbaik diantara Kota di Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat Nasional.

Dan “TERBAIK” menjadi motto juang Aparatur dan masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kidul untuk berkiprah dalam mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

3. Pelayanan publik (costumer service)

Secara umum pelayanan publik (customer service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat / pelanggan.

4.2 MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut *Kotler* bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung merumuskan dari 2 misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan publik prima
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul secara efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kota Bandung menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) misi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung adalah sebanyak 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :



a. Tujuan Misi 1:

- 1) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

b. Tujuan Misi 2 :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan

Sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.1

TUJUAN

Misi	Tujuan
1. Mewujudkan pelayanan publik prima	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul secara efektif, transparan dan akuntabel	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan

Tabel 4.1a

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	Nilai	75	80	85	87	90
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai	60	65	67	70	75,1

Tabel 4.2

SASARAN

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		1.2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaannya sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung adalah sebanyak 11 (sebelas) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat
		2	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
		3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	4	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
		5	Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
		6	Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
		7	Persentase RW Juara
		8	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	9	Rasio Anggota Linmas
		10	Nilai AKIP Kecamatan Bojongloa Kidul
		11	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **diperlukan data dan informasi yang relevan** dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung secara memadai, serta **menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif)** serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Bandung sedang **merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan**. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung pada periode Tahun 2013-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :



TABEL 4.4

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
Tahun 2014-2018**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	SETELAH REVIU					
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)		(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat	75	80	85	87	90
				2.Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
				3.Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	800	900	900	950	1000
			2.Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	4.Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	65%	100%	100%	100%	100%
				5.Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	65%	100%	100%	100%	100%
				6.Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	70%	83,33 %	85%	90%	100%
				7.Persentase RW Juara	65%	65,90 %	80%	90%	100%
				8.Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	65%	80%	80%	90%	100%
				9.Rasio Anggota Linmas	1:1,3	1:1,5	1:1,7	1:1,8	1:1,9
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	10.Nilai AKIP Kecamatan Bojongloa Kidul	60	65	67	70	75,1
				11.Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 4.5 :

Instrumen Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Untuk mengetahui mutu pelayanan yang telah dilakukan SKPD Kecamatan Bojongloa Kidul	Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 204 dan SK Menpan No. 25/2004)	Kecamatan Bojongloa Kidul	dengan menggunakan 14 item permasalahan
		Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	untuk meminimalisir kekurangan / kesalahan kurang dalam memberikan pelayanan	(Jumlah pengaduan pelayanan administrasi ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan pelayanan administrasi seluruhnya) kali 100%	Kecamatan Bojongloa Kidul	Keluhan / Pengaduan adalah ketidaksesuaian kualitas pelayanan yang dialami oleh pelanggan/masyarakat sebagaimana maklumat dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan Bila tidak ada pengaduan /zero complain capaian kinerja 100%
		Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Nilai	Untuk mengetahui nilai kepatuhan pelayanan yang dilakukan kecamatan versi ombudsman RI	Hasil Penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI	Ombudsman RI	Menggunakan 12 variabel penilaian
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	Mengetahui prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu KTP dan KK karena intensitas pelayanannya banyak	Jumlah total persentase jenis pelayanan KTP dan KK dibagi 2 - Jumlah pelayanan KTP yang tepat waktu dibagi jumlah KTP yang dilayani dikali 100% - Jumlah pelayanan KK tepat waktu dibagi jumlah KK yang dilayani dikali 100%	Kecamatan Bojongloa Kidul	Jenis pelayanan kependudukan adalah KTP dan Kartu Keluarga (KK)
		prosentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	untuk mengetahui rata rata persentase waktu pelayanan umum lainnya yang tepat waktu	(Jumlah total persentase jenis pelayanan umum) : 6	Kecamatan Bojongloa Kidul	6 jenis pelayanan - Surat legalisasi (Jumlah pelayanan legalisasi tepat waktu dibagi jumlah pelayanan legalisasi yang dilayani dikali 100%) - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)



						<p>(Jumlah surat keterangan tidak mampu tepat waktu dibagi jumlah surat keterangan tidak mampu yang dilayani dikali 100 %)</p> <p>- Surat Keterangan Miskin (SKM)</p> <p>(Jumlah surat keterangan miskin tepat waktu dibagi surat keterangan miskin yang dilayani dikali 100 %)</p> <p>- SKCK</p> <p>(Jumlah SKCK tepat waktu dibagi jumlah SKCK yang dilayani dikali 100%)</p> <p>- Surat Keterangan Domisili Perusahaan</p> <p>(Jumlah Surat Keterangan Domisili Perusahaan tepat waktu dibagi Jumlah surat keterangan domisili perusahaan yang dilayani dikali 100 %)</p> <p>- Surat Keterangan Domisili Kelembagaan</p> <p>(Jumlah surat domisili kelembagaan tepat waktu dibagi jumlah surat domisili kelembagaan yang dilayani)Untuk memacu kegiatan kelurahan dan mengetahui kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik</p>	
		Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	Untuk memacu kegiatan kelurahan dan mengetahui kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	(Jumlah Kelurahan yang memenuhi Kriteria dibagi Jumlah Kelurahan Se-Kecamatan) x 100 %	Kecamatan Bojongloa Kidul	<p>Kelurahan dengan kriteria baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu 2. Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan



							<p>administratif</p> <p>3. Rasio Sumur Resapan min 1:2 baik</p> <p>4. Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik</p> <p>5. Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun</p> <p>6. Terpelihara / tidak ada rumput liar / gulma yang mencolok setiap triwulan</p>
		Prosentase RW Juara	%	untuk mendukung Program Program dan roadmap Walikota Bandung dalam mempercepat tercapainya Bandung Juara serta mengfungsikan RW untuk lebih giat memantau segala perubahan diwilayahnya masing masing dan melaporkan	$(\sum \text{RW yang memenuhi kriteria dibagi jumlah RW se-Kecamatan}) \times 100 \%$	Kecamatan Bojongloa Kidul	<p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p> <p>1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola komposter skala rumah tangga</p> <p>2. Terdapat sekelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</p> <p>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</p> <p>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</p> <p>5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS</p> <p>Syarat Administratif, RW menyampaikan :</p> <p>1. Menyampaikan Laporan Rutin kependudukan rutin minimal per triwulan</p> <p>2. Menyampaikan Laporan Penduduk</p>



							<p>sementara rutin minimal per triwulan</p> <p>3. Menyampaikan minimal 70% data yang diminta Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al. :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Data Warga Miskin,b. Data PMKSc. Data LInmasd. Data Kejadiane. Data Swadaya Murni <p>Kriteria RW Juara, terdapat minimal/melaksanakan/terdapat 5 dari 22 jenis kondisi dibawah ini : (pakai pembobotan untuk penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Forum Jaga Lembur2. Satu Kampung Satu Taman Bermain3. Balai RW/ Markas Karang Taruna4. Alat2 Band dan Alat2 Kesenian Sunda5. Paguron Silat6. Sanggar Seni Sunda (Jaipong/Kecapi Suling dll)7. Manding Manual/ Touch Screen gabung dengan bangku ala Asia Society
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>8. Biopori/ Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang</p> <p>9. Gapura Kujang</p> <p>10. Les Bahasa Inggris</p> <p>11. Satu Kampung Satu Produk</p> <p>12. Kampung Berkebun</p> <p>13. Lampu Caang Baranang</p> <p>14. Septic Tank Komunal</p> <p>15. MCK Komunal</p> <p>16. Reservoar Komunal</p> <p>17. Gerakan Satu Rumah Satu Pohon</p> <p>18. Gerakan Pagar Hijau</p> <p>19. Movie on the move (Layar tancep0/ Nonton Bareng</p> <p>20. Media Kampanye Kampung JUARA</p> <p>21. Satu Rumah Satu Tempat Sampah</p>
		Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	Untuk memaksimalkan fungsi dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan	(Jumlah Lembaga Kemsyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi Kriteria Aktif dibagi Jumlah Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dan Kecamatan)x 100 %	<p>Kecamatan Bojongloa Kidul</p> <p>Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yaitu :</p> <p>1. LPM Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>2. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>3. Forum Karang Taruna Kecamatan dan</p>



							<p>Karang Taruna Kelurahan Kriteria Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan) 2. Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan/lomba/kejuaraan di tingkat kota minimal 2 kegiatan 5. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan memenuhi kriteria/cek list dari BKBPM dan Dinsos minimal 50%
		Rasio Anggota Linmas	Rasio	Untuk mengetahui perbandingan jumlah anggota linmas dalam 1 RT	Jumlah anggota Linmas dalam 1 RT	Kecamatan Bojongloa Kidul	Jumlah anggota Linmas Aktif dalam 1 RT
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Bojongloa Kidul	Nilai	Untuk mengetahui pencapaian Nilai AKIP Kecamatan	Penilaian dari Inspektorat	Inspektorat Kota Bandung	4 komponen penilaian AKIP (Perencanaan Kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian sasaran dan kinerja organisasi
		Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti	%	Untuk mengetahui prosentase temuan Inspektorat/BPK RI yang sudah ditindaklanjuti	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan kali 100	Kecamatan Bojongloa Kidul	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti



Berdasarkan uraian Tabel **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung 2013-2018 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.** Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

1.4.1 Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan

SWOT Analysis yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/Strength (S)

- 1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung secara kuantitas cukup memadai.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- 4) Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- 5) Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung.

b. Kelemahan/Weakness (W)

- 1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.
- 2) Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota antara lain kemacetan, banjir, persampahan dan penyediaan sarana air minum dan lain-lain.
- 3) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



- 4) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/*Opportunity* (O)

- 1) Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Adanya peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya
- 3) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

b. Ancaman/*Treaths* (T)

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga

mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.

- 2) Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kota Bandung sebagai kota jasa.
- 3) Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Bandung.
- 4) Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase penyaluran dana pada industri besar.
- 5) Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (*global warming*)

Berdasarkan ALI dan ALE tersebut, maka identifikasi lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6

Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
1	2
<p style="text-align: center;"><u>KEKUATAN (STRENGTHS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung secara kuantitas cukup memadai. • Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. • Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. • Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. • Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. • Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kota Bandung. • Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung. 	<p style="text-align: center;"><u>PELUANG (OPPORTUNITIES)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Keberadaan Tol Cipularang telah mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara Jakarta-Bandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang. • Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. • Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah. • Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan <i>factory outlet</i> dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;"><u>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan. • Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota. • Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah • Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemda. • Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;"><u>TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif. • Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia • Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Bandung. • Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). • Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali.

Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan *rating* untuk mendapatkan *scoring* masing-masing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFI) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

NO	FAKTOR INTERNAL STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
<u>KEKUATAN</u>					
1.	Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung secara kuantitas cukup memadai.	10	4	40	I
2.	Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.	6	2	12	
3.	Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	9	3	27	IV
4.	Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.	10	3	30	III
5.	Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.	8	3	24	V
6.	Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kota Bandung.	6	2	12	
7.	Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung.	7	3	21	
<u>KELEMAHAN</u>					
1.	Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan.	8	4	32	II
2.	Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota.	6	2	12	
3.	Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah.	8	3	24	VI
4.	Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemda	8	2	16	
5.	Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemda.	8	2	16	
6.	Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemda daerah.	6	2	12	
TOTAL		100			

Tabel 4.8

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)

NO	FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
PELUANG					
1.	Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.	15	4	60	I
2.	Keberadaan Tol Cipularang memudahkan aksesibilitas yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan PAD.	10	3	30	
3.	Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.	10	4	40	II
4.	Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah.	10	3	30	V
5.	Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan <i>factory outlet</i> dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.	10	3	30	VI
ANCAMAN					
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif.	10	2	20	
2.	Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia	10	4	40	III
3.	Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi	10	4	40	IV
4.	Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai UKM.	5	3	15	
5.	Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung	10	3	30	
TOTAL		100			



1.4.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah. (TU)
- b. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. (Orpad)
- c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah. (Pem Um)
- d. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah. (Umpal)
- e. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Umpal)
- f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Penum)
- g. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan. (TU)



2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM. (Ekonomi)
- b. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan. (PSDA)

3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W - O)

- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. (Umpal)
- b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik. (Orpad)

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W - T)

- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan. (Orpad)
- b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan "Good Governance" melalui implementasi

transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. (Orpad)

Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, maka perlu mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9

MATRIK SWOT

<p style="text-align: center;">KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)</p>	<p style="text-align: center;">RANKING KEKUATAN (S)</p>	<p style="text-align: center;">RANKING KELEMAHAN (W)</p>
<p style="text-align: center;">KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)</p>	<p style="text-align: center;">ASUMSI STRATEGI : S-O</p>	<p style="text-align: center;">ASUMSI STRATEGI : W-O</p>
<p style="text-align: center;">RANKING PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan IPTEK • Tol Cipularang memudahkan aksesibilitas • Peningkatan aktivitas perekonomian • Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman. • Bandung sebagai pusat pendidikan • Bandung terkenal dengan keberadaan perguruan tinggi terkenal. Selain itu pula keberadaan <i>factory outlet</i> dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK. • Meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi • Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan. • Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD • Mendayagunakan sarana dan prasarana • Meningkatkan inovasi dan kreativitas. • Mengembangkan sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. • Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik
<p style="text-align: center;">RANKING TANTANGAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif. • Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia • Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di 	<p style="text-align: center;">ASUMSI STRATEGI : S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan 	<p style="text-align: center;">ASUMSI STRATEGI : W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (<i>action plan</i>) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.



<p>Kota Bandung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali. 	<p>pembangunan dan fasilitas usaha sektor riil dan UKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan "Good Governance" melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.
--	---	---

Berdasarkan matrik SWOT tersebut, maka urutan asumsi dan pilihan strategi dalam kerangka mewujudkan visi menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungan, pada dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10

**MATRIKS PENETAPAN URUTAN ASUMSI
DAN PILIHAN STRATEGI**

ASUMSI STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN								URUTAN PILIHAN STRATEGI
	VISI	MISI							
1	2	3							4 (2+3)
S-O :									
• Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.	4	4	3	3	4	4	3	3	28
• Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.	3	3	3	4	1	2	2	1	19
• Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.	4	3	3	2	4	4	3	3	26
• Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.	4	4	3	2	3	2	3	2	23
• Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	3	3	3	2	3	3	1	3	21
• Meningkatkan inovasi dan kreativitas	3	3	3	2	3	2	3	2	21



<p>seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan. 	3	3	3	2	3	2	3	2	21
<p>S-T :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM. • Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan. 	4	4	4	3	4	4	4	3	30
	3	3	3	4	1	3	1	3	22
1	2								3
<p>W-O :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. • Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik 	3	2	1	1	4	4	1	3	19
	2	3	4	3	2	2	2	3	21
<p>W-T :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (<i>action plan</i>) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan. • Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan "Good Governance" melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. 	4	1	2	2	4	3	2	3	21
	3	4	3	2	4	4	2	4	26



Berdasarkan asumsi-asumsi strategi sebagaimana tercantum pada tabel di atas, maka program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11

Program dan Kegiatan
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

NO	PROGRAM	KEGIATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Peningkatan kualitas Hukum Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Kajian Produk Hukum Daerah2. Penyusunan Produk Hukum Daerah3. Sosialisasi Produk Hukum Daerah4. Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah5. Sinkronisasi Produk Hukum Daerah berbasis HAM6. Fasilitasi Bantuan Hukum Daerah7. Fasilitasi pengembangan hukum daerah8. Dokumentasi produk hukum daerah	Bagian Hukum dan HAM.
2.	Peningkatan dan pemantapan Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Kajian, evaluasi dan pembinaan batas-batas wilayah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.2. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah3. Penyusunan LPPD4. Penyusunan dan pemantapan SOP pendelegasian kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan5. Pemantapan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah6. Fasilitasi Forum Unsur Pimpinan Daerah (MUSPIDA)7. Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Bagian Pemerintahan Umum
3.	Peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan, penataan dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah2. Penyusunan, penataan dan evaluasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah3. Penyusunan uraian tugas unit (UTU) dan jabatan (UTJ) Organisasi Perangkat Daerah4. Penyelenggaraan Analisis Jabatan Organisasi Perangkat Daerah5. Penyusunan, penataan dan evaluasi ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah6. Penyusunan, penataan dan evaluasi tata hubungan kerja organisasi perangkat daerah7. Penyusunan LAKIP	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah



		8. Penyusunan, penetapan dan evaluasi target kinerja SKPD 9. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem informasi organisasi perangkat daerah	
4.	Peningkatan Kerjasama Daerah	1. Kajian dan Evaluasi Kerjasama Daerah 2. Penyelenggaraan kerjasama Dalam Negeri melalui APEKSI 3. Penyelenggaraan kerjasama Luar Negeri melalui Syster City 4. Fasilitasi pengembangan kerjasama Daerah	Bagian Kerjasama Daerah
1	2	3	4
5.	Peningkatan Perekonomian Kota	1. Kajian dan evaluasi sistem perekonomian daerah 2. Penyusunan data base perekonomian daerah. 3. Penyusunan, penataan dan evaluasi SOP produksi dan distribusi barang dan jasa 4. Penyusunan, penataan dan evaluasi potensi dan sumber daya perekonomian daerah 5. Penyusunan, penataan dan evaluasi pengembangan usaha daerah 6. Penyusunan, penataan dan evaluasi kinerja perekonomian daerah 7. Fasilitasi pengembangan sistem perekonomian	Bagian Perekonomian
6.	Peningkatan pembangunan daerah	1. Penyusunan, penataan dan evaluasi program-program pembangunan daerah 2. Penyusunan, penataan dan evaluasi data base pembangunan daerah 3. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah 4. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam 5. Penyusunan, penataan dan evaluasi sarana dan prasarana perkotaan 6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah 7. Fasilitasi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah. 8. Fasilitasi pengembangan laporan pembangunan daerah	Bagian Pembangunan dan SDA
7.	Peningkatan kesejahteraan rakyat	1. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan kesejahteraan rakyat 2. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem penanggulangan kemiskinan daerah 3. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan sosial keagamaan 4. Penyusunan dan pengembangan data base PMKS, Masyarakat Miskin, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan 5. Fasilitasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan 6. Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bandung 7. Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan 8. Fasilitasi pengembangan kebijakan sistem kesejahteraan rakyat.	Bagian Kesra dan Masyarakat
8.	Peningkatan	1. Penyusunan, penataan dan evaluasi tata kelola	Bagian Tata



	tata kelola kepegawaian, keuangan dan administrasi naskah dinas	kepegawaian SETDA 2. Penyusunan, penataan & evaluasi tata kelola keuangan SETDA 3. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem administrasi naskah dinas 4. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi daerah 5. Fasilitasi pengembangan karier, diklat dan disiplin pegawai 6. Fasilitasi pengembangan sistem pelaporan keuangan dan kepegawaian daerah 7. Penyelenggaraan sistem persandian dan telekomunikasi daerah	Usaha Setda
1	2	3	4
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Penyusunan, penataan dan evaluasi pendayagunaan sarana dan prasarana aparatur 2. Penyusunan, penataan dan evaluasi standar penggunaan sarana dan prasarana aparatur 3. Penyusunan, penataan dan evaluasi standar keprotokolan daerah 4. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan sarana dan prasarana aparatur daerah 5. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan manajemen aset daerah 6. Fasilitasi kegiatan dinas pimpinan 7. Fasilitasi pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana aparatur daerah 8. Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana aparatur daerah	Bagian Umum dan Perlengkapan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam periode 2013-2018, sebagaimana tabel berikut ini :

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya **program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.**



Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2013-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.



BAB V

RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari



setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Bojongloa Kidul pada periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan



sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Bojongloa Kidul periode tahun 2014 – 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung 2014-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			SKPD Penanggung	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp (juta)			jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	1.20.1.20.22.30	Program : Non Urusan/ Penunjang	Meningkatnya IKM	65	75	3,100,000,000	80	3,410,000,000	85	3,751,000,000	87	4,126,100,000	90	4,538,710,000	90	4,538,710,000	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel	
		2. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti			Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100		100		100		100		100		100		100	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel
		3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI			Meningkatnya nilai kepatuhan pelayanan publik kecamatan	765	800		900		900		950		1000		1000		1000	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel
	2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	4. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	65%	65	25,000,000	100	27,500,000	100	30,250,000	100	33,275,000	100	36,602,500	100	36,602,500	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel	



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
Tahun 2014-2018*

		5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	meningkatnya pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	65%	65	25,000,000	100	27,500,000	100	30,250,000	100	33,275,000	100	36,602,500	100	36,602,500	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel
		6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	Kelurahan memenuhi standar kriteria baik	50%	70	1,800,000,000	83,33%	1,980,000,000	85%	2,178,000,000	90%	2,395,800,000	100%	2,635,380,000	100%	2,635,380,000	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel
		7. Persentase RW Juara	PIPPK	Meningkatnya jumlah RW Juara	10%	65%		65,90%	4,400,000,000	80%	4,840,000,000	90%	5,324,000,000	100%	5,856,400,000	100%	5,856,400,000	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel
		8. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	PIPPK	Meningkatnya aktifitas lembaga kemasyarakatan	25%	65%		80%	1,800,000,000	80%	1,980,000,000	90%	2,178,000,000	100%	2,395,800,000	100%	2,395,800,000	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel
		9. Rasio Anggota Linmas	Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	Rasio jumlah linmas per RT terpenuhi	1:01	1:1,3	50000000	1:1,5	55,000,000	1:1,7	60,500,000	1:1,8	66,550,000	1:1,9	73,205,000	1:1,9	73,205,000	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	10. Nilai AKIP Kecamatan Bojongloa Kidul	Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya nilai AKIP kecamatan	45	60	15,000,000	65	16,500,000	67	18,150,000	70	19,965,000	75,1	21,961,500	75,1	21,961,500	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel
		11. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti		Semua temuan inspektorat/BPK ditindaklanjuti	100	100	15,000,000	100	16,500,000	100	18,150,000	100	19,965,000	100	21,961,500	100	21,961,500	Kec. Bojongloa Kidul	Kec dan 6 kel
							5,030,000,000		11,733,000,000		12,906,300,000		14,196,930,000		15,616,623,000		15,616,623,000		

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung berdasarkan 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 8 (delapan) program dan 11 (sebelas) kegiatan indikatif, sebagai berikut :

Tabel 5.2

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Program Non Urusan 2. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	1. Kegiatan Non Urusan 2. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat akat
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4. Program Inovasi Pembangunan dan pemberdayaan Kewilayahn	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Lingkungan Masyarakat - Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan - Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kec dan kel. - Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat - Fasilitasi Kegiatan Lingkup RW - Fasilitasi Kegiatan Lingkup LPM - Fasilitasi Kegiatan Lingkup PKK - Fasilitasi Kegiatan Lingkup Karang Taruna
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja Birokrasi	5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Penyusunan laporan keuangan

BAB VI
INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Bojongloa Kidul untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung yaitu :

1. IKM SKPD/Unit Kerja (Indeks / IKM / mutu Layanan SKPD / Unit Kerja;
2. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;
3. Opini Keuangan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung; dan
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6.1

Indikator kinerja Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2018

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SETELAH REVIU					
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)		(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1..Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat	1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat	75	80	85	87	90
				2.Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
				3.Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	800	900	900	950	1000
2.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	2.Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 3..Persentase RW Juara 4.Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	2.Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	4.Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	65%	100%	100%	100%	100%
				5.Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	65%	100%	100%	100%	100%
				6.Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	70%	83,33%	85%	90%	100%
				7.Persentase RW Juara	65%	65,90%	80%	90%	100%
				8.Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	65%	80%	80%	90%	100%
				9.Rasio Anggota Linmas	1:1,3	1:1,5	1:1,7	1:1,8	1:1,9
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	5.Nilai AKIP Kecamatan Bojongloa Kidul	3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	10.Nilai AKIP Kecamatan Bojongloa Kidul	60	65	67	70	75,1
				11.Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bojongloa Kidul sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Bojongloa Kidul merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Visi Kecamatan Bojongloa Kidul sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2018, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kidul.

Rencana strategis Kecamatan Bojongloa Kidul akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.



Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sampai dengan tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul.

Bandung, 2 Juni 2014

Camat Bojongloa Kidul

Dra. ANIYA RACHMAWATI SP, M.Si
NIP. 19661229 198803 2 007